

## Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas

Marsianus Reresi<sup>a,1\*</sup>, Bernard Antonius Rahawarin<sup>a,2</sup>, William Ngoranubun<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon, Indonesia

<sup>1</sup> marsianusreresi@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 15 Maret 2023;

Revised: 29 April 2023;

Accepted: 19 Juni 2023.

Kata-kata kunci:

Kekerasan Simbolik;

Relasi Kuasa;

Guru;

Peserta Didik.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis relasi guru dan peserta didik dalam perspektif teori Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengamati secara langsung perilaku guru dan peserta didik dalam berelasi dan berinteraksi di lingkungan sekolah. Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik snowball. Hasil penelitian menemukan bahwa melalui teknik analisis secara deskriptif ditemukan bahwa dalam relasi guru dan siswa terkandung kekerasan simbolik yang tidak disadari karena minimnya pemahaman dan kesadaran guru dan siswa serta adanya ketidaksetaraan kuasa simbolik. Maka perlu strategi untuk mewujudkan sekolah yang bebas dari kekerasan simbolik. Rekomendasi penelitian, adanya kebijakan sekolah yang menekankan budaya sekolah yang lebih dialogis tanpa ada unsur kekerasan simbolik. Guru hendaknya mengembangkan pemahaman dan kesadaran yang obyektif mengenai kekerasan simbolik dan adanya pengakuan objektif melalui habitus. Peserta didik sebaiknya bersikap kritis terhadap perilaku guru yang mengandung kekerasan simbolik dan berani menyampaikan kepada guru.

### ABSTRACT

***The Critical Analysis of Symbolic Violence between Teachers and Students in High School.*** This study aims to critically examine the relationship between teachers and students in the perspective of Piere Bourdieu's theory of symbolic violence. Researchers used a phenomenological approach to directly observe the behavior of teachers and students in relating and interacting within the school environment. The research was conducted at SMAN 8 Saumlaki, Tanimbar Islands District. Data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and documentation studies. Research subjects were selected using the snow ball technique. The analysis technique uses data triangulation analysis. The results of the study show that in the teacher-student relationship there is symbolic violence which is not realized because of the lack of understanding and awareness as a result of the imbalance of symbolic power between the teacher and the dominated students. So a strategy is needed to realize a school that is free from symbolic violence. The research recommends, the existence of school policies that emphasize a more dialogical school culture without any element of symbolic violence. Teachers should develop an objective understanding and awareness of symbolic violence and objective recognition through habitus. Students should be critical of teacher behavior that contains symbolic violence and dare to convey it to the teacher.

Keywords:

Symbolic Violence;

Power Relations;

Teachers;

Students.

Copyright © 2023 (Marsianus Reresi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Reresi, M., Rahawarin, B. A., & Ngoranubun, W. (2023). Telaah Kritis Kekerasan Simbolik antara Guru dan Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8(2), 156–167. <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8177>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Sekolah merupakan wadah pembentukan dan pengembangan diri peserta didik (Nashihin, 2019; Roosyidah, & Sutarna, 2016). Melalui aktivitas pendidikan di sekolah, terjadi hubungan antara guru dan peserta didik. Kualitas relasi dan interaksi guru dan peserta didik menjadi penentu pencapaian output pendidikan. Jalinan yang diharapkan antara guru dan peserta didik tentu saja bersifat menyenangkan, harmonis, penuh cinta dan keakraban. Guru dalam menjalankan tugas memberikan bimbingan, mengarahkan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan potensi siswa, diharapkan tampil sebagai motivator bagi peserta didik dalam belajar, menjadi sandaran bagi siswa dan bahkan menjadi wadah bagi peserta didik mendapatkan kasih sayang. Dengan begitu peserta didik akan merasa aman dan tampil percaya diri saat berada di lingkungan sekolah (Amirulloh, 2018; Bilqis, Karina, & Latipah, 2019).

Harapan akan mutu hubungan yang harmonis antara guru dan siswa sepertinya masih menjadi utopia karena fenomena kekerasan masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi wadah bagi peserta didik untuk hidup nyaman, bebas mengekspresikan dirinya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dan jauh dari bentuk kekerasan, justru ditemukan adanya pelbagai bentuk tindakan kekerasan di sekolah. Relasi dan interaksi guru dan peserta didik yang diwarnai dengan tindakan kekerasan menjadi penyebab peserta didik kehilangan rasa percaya diri, motivasi belajar menjadi lemah dan secara sadar maupun tak sadar memandang sekolah sebagai wadah yang menakutkan (Sidjabat, 2021). Situasi memprihatinkan ini memberi dampak negatif terhadap mutu proses dan sekaligus output pendidikan.

Secara umum kekerasan merupakan sikap semena-mena dari pihak dominan dan memiliki kuasa terhadap pihak subdominant yang berada dipengaruh kekuasaan. Kekerasan biasanya bersifat destruktif yang dapat meninggalkan bekas luka serius secara fisik maupun perasaan traumatis yang mendalam secara psikis. Peserta didik yang menjadi objek kekerasan akan merasa terisolir secara sosial, minder, tertekan, dan bahkan menurunkan motivasi belajar. Bentuk kekerasan yang sering dialami siswa di sekolah berupa kekerasan fisik, verbal, mental, dan kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang beroperasi dalam alam ketidaksadaran dalam diri pelaku maupun diri korban karena itu sering tidak dirasakan dan dikenali. Kekerasan ini sering terjadi melalui mekanisme kultural.

Kekerasan simbolik terjadi akibat penyelewengan modal simbolik oleh pihak papan atas atau yang memiliki kuasa terhadap pihak yang dipandang marginal. Hubungan dan interaksi antara kedua pihak terjadi secara tidak seimbang atau tidak setara. Kekerasan simbolik sebagai operasi pemaksaan pemikiran dari pihak yang dominan dan mempersepsikan diri serta memposisikan diri sebagai pihak yang benar terhadap agen-agen sosial yang terdominasi.

Sekolah dapat menjadi lahan subur terjadinya kekerasan simbolik terlebih dalam relasi dan interaksi antara guru dan peserta didik. Hasil observasi awal menegaskan bahwa SMAN 8 Saumlaki merupakan sekolah yang dipandang oleh masyarakat Tanimbar sebagai sekolah “unggulan”. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2008 ini sangat diminati oleh masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Sekolah yang terakreditasi A (unggul) pada tahun 2021 ini dipandang berkualitas proses dan output pendidikan oleh masyarakat Tanimbar, juga dikategori sebagai sekolah ramah anak.

Keberadaan dan pelbagai prestasi yang diraih sekolah tersebut memicu ketertarikan peneliti melakukan telaah kritis terhadap relasi guru dan peserta didik di SMAN 8 Saumlaki Kepulauan Tanimbar yang ditinjau dari pandangan Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik

---

dalam rangka mempertanyakan kondisi hubungan guru dan peserta didik di lingkungan sekolah. Telaah kritis ini hendak menelusuri dan menguak secara objektif ada, namun terkadang tidak disadari keberadaannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka pertanyaan sentral yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kondisi riil relasi guru dan peserta didik di SMAN 8 Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam perspektif kekerasan simbolik. Tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan kondisi riil relasi guru dan peserta didik di SMAN 8 Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta menawarkan solusi alternatif model relasi guru dan peserta didik tanpa kekerasan simbolik.

Penjelasan tentang kepustakaan, pertama, konsep dasar kekerasan simbolik. Pierre Bourdieu (1930-2002) seorang sosiolog, dan juga seorang filsuf kritis dari Perancis memperkenalkan kekerasan simbolik sebagai patron penguasaan budaya yang lebih kuat terhadap budaya yang lemah yang secara tidak sadar dihidupi oleh masyarakat yang tercermin dalam tindakan diskriminatif. Bourdieu memproklamasikan istilah “kekerasan simbolik”, “kuasa simbolik”, dan “dominasi simbolik” untuk menandasakan makna yang sama yakni sebagai kuasa yang semena-semena dari pihak dominan untuk menciptakan dan mengubah realitas.

Mekanisme kekerasan simbolik terjadi akibat dari keyakinan pihak korban terhadap aktor dan bahkan merasa berhutang budi serta loyal (John B Thompson dan Haqqul Yaqin, 2003). Menurut Bourdieu, dalam dominasi simbolis kekuasaan yang dipaksakan oleh pihak superior kepada subordinat berlangsung secara halus dan bahkan tidak terasa oleh sasaran kekerasan (Haryatmoko, 2010).

Kekerasan simbolik melekat dalam setiap bentuk tindakan dan mental individu, dan menjadi pengendali yang mengesahkan atau membenarkan pemegang kekuasaan dalam tatanan sosial. Kekerasan ini tidak diketahui namun dinikmati sebagai sebuah kelaziman oleh pihak yang menjadi santapan kekerasan, dan tetap bereksistensi. Hal ini terjadi sebab ada ketergantungan absolut secara sosial. Pandangan ini sejajar dengan pendapat Fashri, menurutnya kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang lembut dan tidak terlihat terimplementasi melalui jalan simbolis komunikasi dan pihak korban tidak mengetahui keberadaannya karena ketidaktahuan (Fashri Fauzi, 2014: 243).

Pertautan kekerabatan sosial yang terjalin menjadi arena istimewa untuk memahami hegemoni yang bergerak atas nama prinsip simbolik yang dimaklumi dan dihalalkan baik oleh pihak pengendali maupun pihak yang dikendalikan. Prinsip itu antara lain norma, kultur, penalaran, gaya tutur, perilaku, karakteristik, dan stigma (Haryatmoko, 2010). Prinsip ini menyerang dan menentukan pola pikir, perspektif, reaksi batin, tanggapan dan perilaku individu (Haryatmoko, 2007).

Dalam arena kultural dan sosial, aktor dominan memainkan kuasanya untuk menyatukan atau sebaliknya memisahkan, melestarikan atau menghancurkan makna sosial serta merepresentasi diri dan kaumnya sebagai nilai yang harus diinternasionalisasikan oleh kaum marginal. Dan peran itu dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sah untuk kepentingan kelompok yang mendominasi (Martono, 2012).

Konsep kekerasan simbolik milik Pierre Bourdieu bertolak dari gagasan tentang adanya struktur kelas dalam realita sosial yang secara sistematis sebagai relasi dialektika dalam menentukan diseminasi budaya dan ekonomi. Menurut Bourdieu, kekerasan simbolik berada dalam arena kekuasaan dan karena itu kekerasan merupakan akar dan buah praktik kekuasaan.

---

Ketika sebuah kelas dominan menguasai kelas subdominan maka di dalam operasi itu akan menghasilkan kekerasan simbolik. Adanya struktur kelas dalam masyarakat menjadi efek dari adanya ketidaksejajaran atau disharmoni atau distingsi (William E Deal dan Timothy Kandler Beal, 2004).

Kekerasan simbolik cenderung dilakukan oleh agen dari kelas primer terhadap kaum sekunder dalam masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki kaum borjuis mendominasi kaum papa (Martono, 2012). Itu artinya sistem sosial masyarakat terpola ke dalam kelas kapital dan kelas nonmodal. Sehubungan dengan hal ini, Bourdieu mengungkapkan beberapa konsep dasar yakni, modal, arena dan habitus. Ide dasar ini kemudian mengarahkan pada mekanisme kekerasan simbolik. Berikut ini dijelaskan beberapa paham kunci untuk memahami makna kekerasan simbolik menurut Bourdieu, yakni: pertama, modal. Bourdieu memaknai modal tidak sebatas kepemilikan materi, barang atau benda melainkan lebih dari pada itu sebagai daya atau hasil kerja. Modal menjadi daya simbolik dan berpengaruh secara kultural dan sosial. Modal juga diartikan sebagai kekuasaan dalam berinteraksi dengan dunia di luar diri individu atau kelompok. Dalam relasi sosial itu terjadi alterasi atau metamorfosis dalam wujud materi atau daya simbolik (Bourdieu, 2006).

Bourdieu memetakan jenis modal menjadi empat bagian yaitu: (1) modal ekonomi mencakup fasilitas produksi dan finansial yang mudah dialterasi ke kapital atau modal lain (Bourdieu, 2018; Haryatmoko, 2010); (2) modal sosial adalah sekumpulan sumber daya yang terkait dengan jaringan dan hubungan dalam rangka penentuan kedudukan sosial dan agregasi modal. Wujud modal sosial antara lain kemampuan kolaborasi yang melahirkan kepercayaan, loyalitas, solidaritas. Semua wujud modal sosial itu bertumbuh dan berkembang dalam keluarga, masyarakat, organisasi maupun institusi; (3) modal budaya merupakan aset kemampuan seseorang yang menentukan kedudukan sosial. Misalnya sikap, kecakapan berbahasa, life style, adat-istiadat, bakat, pengetahuan, kepemilikan ijazah, gelar akademik dan sejenjennya (Martono, 2012:33). Bourdieu membagi modal budaya ke dalam tiga bentuk yakni, Pertama, modal budaya yang terintegrasi ke dalam diri dan bertahan lama, misalnya bakat dan pengetahuan seseorang yang diperoleh dari hasil pendidikan Kedua, modal budaya objektif dalam rupa kepemilikan barang atau benda karena memiliki modal ekonomi. Misalnya memiliki buku dan karya seni. Ketiga, modal budaya yang terinstitusikan. Misalnya gelar pendidikan, anggota konsorsium, delegatus suatu institusi dan reputasi lainnya (Haryatmoko, 2010:17). (4) modal simbolik merupakan daya yang dimiliki oleh seseorang untuk meraih kekuasaan yang diakui secara sah, seperti prestise, ketenaran, kehormatan karena gelar, nama besar keluarga atau nama besar kelompok, jabatan, pemilihan tempat tinggal, mobil mewah (Haryatmoko, 2007).

Bagi Bourdieu, komposisi modal yang dimiliki seseorang akan berpengaruh signifikan terhadap kedudukan sosial dan kuasa simbolik. Dengan demikian makin tinggi pula dominasi sosial di tangan masyarakat. Sebaliknya makin kecil modal yang dimiliki seseorang maka terbuka peluang untuk dikuasai oleh pemilik modal.

Penjelasan kedua mengenai arena. Konsep arena menunjuk pada tempat pertarungan kekuatan, dan perjuangan aktor mempertahankan atau mengubah struktur hubungan-hubungan kekuasaan melalui modal yang dimiliki atau akumulasi modal. Arena merupakan lapangan bagi para agen berkompetisi mempertunjukkan kuasa simboliknya. Dalam arena terjadi pendistribusian modal secara tidak seajar, sehingga ada yang menguasai dan ada yang dikuasai

---

tergantung dari seberapa banyak aktor memiliki kapital dan memainkan kepemilikan kapitanya.

Arena sosial memiliki aturan mainnya tersendiri atau habitus yang khas. Maka setiap pelaku yang masuk dalam suatu lintasan sosial harus menguasai kode atau aturan mainnya. Setiap aktor selalu berhadapan dengan arena sosial, habitus dan posisi dalam arena. Keberhasilan pelaku sangat ditentukan oleh besaran kapital yang dimiliki dan posisi pelaku di arena sosial serta habitus yang dituntut. Nilai kapital tergantung pada jenis arena dan pertarungan yang dimainkan (Haryatmoko, 2007).

Dalam pertarungan aktor di arena menimbulkan terbentuknya kelas. Diskursus tentang kelas erat kaitannya dengan konsep modal karena setiap kelas memiliki sikap, selera, kebiasaan, perilaku atau bahkan modal yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan munculnya hubungan antar kelas yang tidak harmonis.

Menurut Bourdieu kelas masyarakat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: (a) kelas dominan yakni mereka yang memiliki berbagai modal dan mampu menguasai kelas lainnya. (b) kelas borjuasi kecil adalah kelas menengah yang memiliki hasrat untuk meningkatkan status sosial yang sederajat dengan kelas dominan namun mereka tidak punya kemampuan untuk memaksakan identitasnya kepada kelas lain. (c) kelas populer adalah kaum papa yang pasrah terhadap tindakan pendorongan kelas dominan (Martono, 2012).

Penjelasan ketiga, habitus. Bourdieu menggunakan konsep habitus dalam menganalisis masyarakat untuk mengatasi problem dikotomi antara individu-masyarakat, agen-struktur sosial, kebebasan-determinisme. Dalam hal ini, Bourdieu menjelaskan habitus sebagai mekanisme dan strategi dominasi. Habitus merupakan struktur mental yang terinternalisasi dalam diri setiap individu yang menghasilkan serangkaian pola persepsi, pemahaman, apresiasi dan evaluasi realitas di luar diri. Habitus menjadi produk dunia sosial dan karena itu selalu berada dalam proses strukturisasi. Habitus berfungsi sebagai prinsip yang mengatur praktik kehidupan (Bourdieu, 2006). Habitus terwujud dalam kebiasaan individu atau masyarakat yang diyakini sebagai pedoman berpikir dan berperilaku. Karena itu, habitus dapat menggerakkan perilaku, mempengaruhi struktur kognitif untuk melakukan suatu tindakan, dan bahkan dapat membantu individu untuk beradaptasi dengan posisi yang ditempati dalam lingkup sosial (Haryatmoko, 2007).

Habitus tumbuh dan berkembang secara alami namun keberadaannya tidak bersifat permanen dalam diri individu atau kelompok melainkan terus mengalami perubahan. Hal ini senada dengan pandangan George dan Douglas (2005), yang berpandangan bahwa habitus tidaklah bersifat permanen namun terus mengalami perubahan dan berkembang dalam lingkungan sosial.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Simbolik. Titik pertemuan antara kekuasaan dan kekerasan yakni pada kapital simbolik. Kekerasan berada dalam pusran kekuasaan sebagai cara ampuh menciptakan dan melestarikan praktik dominasi dalam lintasan sosial. Kelas dominan berkekuasaan secara perlahan namun pasti tanpa disadari oleh sasaran kekerasan.

Praktek kekerasan simbolik terwujud dalam dua bentuk yakni (Haryatmoko, 2007): Pertama, Bentuk dan mekanisme eufemisme yang bekerja atas dasar keharusan, kesetiaan, penegasan, kebaikan, peraturan dan tata tertib, kegunaan, perintah, kepercayaan, keselarasan, jasa, pahala, sopan-santun, kewajiban, pemberian bonus, belas kasih, pencitraan, dan kesediaan, sehingga tidak tampak, tidak dapat dikenali sebagai kekerasan dan bahkan berlangsung di bawah alam bawah sadar., keselarasan, kebaikan, penegasan,. Dalam kondisi

---

tersebut nilai-nilai disusupkan untuk melegitimasi kuasa demi merebut atau memperkokoh kekuasaan (Jazeri, 2009).

Kedua, Bentuk dan mekanisme sensoriasi, yang menjadikan kekerasan simbolik terasa sebagai upaya pelestarian nilai yang diklaim sebagai “moral kehormatan”, yang dipertentangkan dengan “moral rendah”. Wujud “moral kehormatan”, antara lain kesantunan, kesucian, kedermawanan. Sedangkan “moral rendah” tercermin dalam tindakan asusila, tindakan kriminal, tindakan kekerasan, kerasukan dan ketidakpantasan (Martono, 2012).

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller metode penelitian kualitatif adalah penelitian sosial yang berbasis pada pengamatan terhadap manusia dalam hubungan dengan bahasa dan peristilahannya (Moleong, 2009). Senada dengan itu, menurut Sugiyono (2012) penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang natural demi memperoleh makna atau nilai yang terkandung di balik data yang tampak. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif aktivitas penelitian berkembang sesuai dengan situasi lapangan yang menekankan pada catatan lapangan saat penelitian berlangsung. Metode penelitian kualitatif dipilih karena diyakini bahwa melalui peneliti akan memperoleh gejala-gejala yang terjadi di lapangan secara menyeluruh ketika peneliti terjun langsung ke lapangan, tinggal dan ikut merasakan keadaan lapangan terkait dengan objek penelitian. Dengan perolehan data secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya maka peneliti dapat melakukan pendeskripsian terkait objek kajian dan kemudian menafsirkan makna. Penelitian dilakukan di kelas X SMA 8 Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak bulan Juni s/d Oktober 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala aktivitas di lapangan terkait objek kajian (Gulo, 2003). Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat segala aktivitas terkait kekerasan simbolik dalam relasi guru dan peserta didik. Peneliti mewawancarai 50 siswa kelas X dan 15 guru serta Kepala Sekolah. Data pengamatan dan wawancara ditunjang dengan data dokumen yang diperoleh. Keseluruhan data penelitian yang diperoleh akan analisis secara kualitatif.

## Hasil dan pembahasan

Hasil temuan pertama, bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik di SMAN 8 Saumlaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik dalam interaksi guru dan siswa di SMAN 8 Saumlaki terjadi melalui eufemisme dan sensoriasi. Bentuk dan mekanisme eufemisme yang tampak dominan dalam wujud (a) perintah dan larangan, (b) peraturan dan tata tertib, (c) pemberian bonus, (d) kepercayaan, (e) hukuman atau sanksi. Sedangkan, bentuk dan mekanisme sensoriasi berupa (a) ancaman dan paksaan, (b) pemarginalan.

Berikut bentuk dan mekanisme eufemisme diuraikan sebagai berikut: Pertama, Perintah dan Larangan. Perintah dan larangan adalah wujud kekerasan simbolik melalui bentuk dan mekanisme eufemisme yang dilakukan guru SMAN 8 Saumlaki kepada siswa agar melakukan atau menjalankan sesuatu yang diperintahkan dan sekaligus menekankan pengontrolan terhadap sikap siswa yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas pada lingkungan SMAN 8 Saumlaki. Dengan menggunakan kuasanya, guru menuturkan memberikan perintah dan larangan yang berintonasi tinggi kepada siswa dan siswa pun wajib mengikuti perintah guru. Perintah dan larangan yang disampaikan harus dilaksanakan. Siswa tidak memiliki kesempatan

---

untuk mempertimbangkan apakah perintah dan larangan yang disampaikan guru dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan.

Ketika mendengar perintah dan larangan guru, siswa langsung menunjukkan perilaku kesediaannya untuk melaksanakan. Kalimat perintah dan larangan yang sering terlontarkan misalnya: “Maju ke depan kelas”, “Duduk diam”, “Pimpin doa”, “Jawab pertanyaan Ibu”, “Yang tidak kumpul tugas kerjakan di luar kelas sekarang”, “Keluar dari ruangan kelas”. “Tunggu Bapak di Ruang Kerja”, “Cepat lari” “Angkat kursi”, “Tidak boleh ribut”, “Jangan main gila”, “Cepat ke sini”, “Siswa yang lain diam”, “Lain kali tidak boleh mengulangi lagi sikapmu itu”, “Jangan ulangi perbuatan yang tidak baik”, “Jangan lakukan lagi pelanggaranmu”, “Lain kali jangan terlambat lagi”. Perintah dan larangan guru kepada siswa menandakan penguasaan guru terhadap siswa sebagai sub dominan. Siswa sebagai pihak korban tidak berani membantah dan cenderung patuh dan pasrah serta melakukan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh guru sebagai kelas dominasi.

Kedua, Peraturan dan Tata Tertib. Guru SMA 8 Saumlaki berpandangan bahwa dalam mendisiplinkan siswa perlu ada standar perilaku yang dapat diukur terkait kedisiplinan diri siswa. Kriteria minimal perilaku itu termuat dalam peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Melalui pengkondisian pola perilaku siswa melalui peraturan dan tata tertib sekolah maupun kelas maka penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat terpantau dan terukur sehingga dapat diminimalisir. Peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah SMAN 8 Saumlaki, misalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, wajib mengikuti upacara bendera, disiplin waktu (masuk sekolah tepat waktu, kumpul tugas tepat waktu), menjaga ketertiban kelas, menghargai sesama, berpakaian rapi. Berhadapan dengan pengkondisian tersebut, siswa pun memakluminya sebagai suatu kewajiban dan harus ada demi menertibkan perilaku mereka (Gultom, 2022; Agustina, 2022).

Ketiga, Pemberian Bonus. Demi memotivasi siswa agar giat belajar, berani mengungkapkan pendapat, dan disiplin, maka guru memberikan bonus/reward/pujian kepada siswa. Dalam hal ini tindakan guru memberikan bonus kepada siswa menjadi wujud eufemisme yang dilakukan Guru SMAN 8. Siswa melakukan kehendak guru karena termotivasi untuk memperoleh pujian, bonus, hadiah dari guru. Data lapangan membuktikan adanya pemberian bonus, misalnya, “siapa yang bisa menjawab soal Ibu maka dia dapat nilai 100”, “Bagus sekali pendapatmu”, “Kamu rajin sekali”, “Hebat kamu”, “Luar biasa”, “Coba dari dulu seperti begini, kan Ibu senang melihatnya”. Selain kata-kata pujian pemberian bonus juga berupa materi misalnya kepala sekolah memberikan tropi dan piagam bagi siswa yang berprestasi. Pemberian bonus diberikan kepada siswa baik secara individu maupun di kelas dan bahkan melalui ajang apel sekolah, saat pembagian LHS di depan orang tua. Motivasi guru kepada siswa melalui pemberian bonus secara kasat mata dipandang oleh guru dan siswa sebagai satu bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap prestasi siswa. Namun pemberian bonus unsur persyaratan yang harus dipenuhi siswa sehingga pemberian bonus dapat menjadi upaya intimidasi guru kepada siswa dan karena itu menjadi wujud eufemisme.

Keempat, Kepercayaan. Guru menanamkan kepercayaan kepada peserta didik dengan cara meyakinkan peserta didik mengenai sesuatu yang diyakini kebenarannya. Berikut data wawancara yang menyatakan eufemisme berupa kepercayaan terjadi di SMAN 8 sebagai berikut: “Kelas ini orang-orangnya pintar-pintar pasti dapat menjawab pertanyaan ibu guru”, “Bukankah kalian semua hebat-hebat, pasti tahu jawabannya”, “Anda memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa yang diberikan Tuhan, karena itu anda harus kembangkan agar berguna

---

bagi banyak orang”, “Pak guru bangga dengan kamu, pak guru berharap, anda terus berlatih meningkatkan kemampuan critical thinking dalam membangun case building sesuai motion yang diterima”. Data di atas menunjukkan bahwa kepercayaan guru terhadap siswa merupakan bentuk pemotivasian agar kepercayaan diri siswa berkembang namun secara tanpa sadar siswa dipaksakan untuk harus mampu menjawab karena sudah dianggap hebat dan pintar. Siswa akan merasa malu atau minder ketika tidak mampu menjawab pertanyaan guru. Begitu pula peserta didik harus mengembangkan dirinya karena jika tidak maka akan mengecewakan guru yang telah membanggakan dirinya.

Kelima. Hukuman atau Sanksi. Salah satu wujud kekerasan simbolik bentuk eufemisme yakni hukuman atau sanksi yang diberikan guru terhadap peserta didik. Bentuk eufemisme ini dapat dilihat pada data berikut:

“Ini teguran pertama untukmu, kalau kamu masih melanggar maka kamu diberi surat panggilan orang tua kamu harap dapat mengerti pembinaan yang telah diberikan oleh guru kepada kamu demi merubah pribadi kamu. Yang belum mengumpulkan tugas maka tidak boleh ikut pembelajaran. Anda harus mengerjakan di luar kelas selama jam pelajaran berlangsung. Di akhir jam pelajaran tugas wajib dikumpulkan. Tulis 100 kalimat permintaan maaf lalu kirim ke wa guru”.

Hal yang berkaitan dengan masalah kedisiplinan peserta didik pemberian hukuman atau sanksi menjadi solusi jitu yang diterapkan guru untuk membuat peserta didik merasa jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar peraturan.

Bentuk dan mekanisme sensorisasi yang tampak dominan di SMAN 8 Saumlaki, antara lain: (a), Ancaman dan Paksaan (b) Pemarjinalan. Bentuk dan mekanismenya diuraikan sebagai berikut: Pertama, Ancaman dan Paksaan. Kuasa Simbolik yang dimiliki guru menjadi dasar guru melakukan kekerasan simbolik terhadap peserta didik dengan menciptakan kondisi batin peserta didik tidak nyaman dan peserta didik terpaksa melakukan sebagaimana kehendak guru. Wujud ancaman dan paksaan yang tampak misalnya, “Tuntaskan tugasmu di luar kelas selama jam pelajaran jika tidak maka anda tidak lulus mata pelajaran ini”, “Sebelum ulangan rambutmu sudah harus terlihat rapi, jika tidak maka tidak diijinkan masuk ke ruang ujian”, “Yang tidak bisa pimpin doa dalam bahasa daerah, dia tidak boleh ikut pelajaran”, “Sampai Bapak lihat kamu masih buat ulah di kelas maka kamu berjemur di bawah tiang bendera”, “Awat jika tidak kumpul tugas tepat waktu”, “Cepat Kerjakan tugasmu”, “Cepat jawab”. Dalam posisi yang terancam peserta didik mau dan tidak mau harus melakukannya, Modal simbolik yang dimiliki guru menempatkan guru berada pada kelas dominan. Apapun ancaman guru peserta didik tetap menjalaninya dengan setiap.

Kedua, *Pemarjinalan*. Guru menjelek-jelekkan perbuatan peserta didik misalnya “kampungan”, Kalau su dari kampung jangan bertindak kayak orang kampung”, “Bodoh”, “Tolol”, “Nau-nau”, “Lola sekali otakmu”. Berhadapan dengan tindakan pemarjinalan itu, peserta didik menerima dengan lapang dada meskipun merasa malu. Hal ini tampak dalam data lapangan, misalnya: “Saya merasa malu namun saya harus diam”, “Saya menerima dengan senang hati karena sadar akan kesalahan”, “Saya menerima dan merubah perilaku”, “Saya Kaget serta merasa bersalah”. Data ini menunjukkan bahwa secara tidak sadar guru memandang peserta didik memiliki “derajat rendah” dan menghendaki agar peserta didik memiliki “derajat yang tinggi” atau dalam bahasa Bourdieu memiliki “Moral kehormatan” dan peserta didik pun mengakuinya.



---

Hasil temuan kedua, penyebab terjadinya kekerasan simbolik di SMAN 8 Saumlaki. Berdasarkan data penelitian, penyebab terjadinya kekerasan simbolik dalam bentuk dan mekanisme eufemisme dan sensorisasi di SMAN 8 Saumlaki dapat ditandaskan sebagai berikut: pertama, Pemahaman guru yang minim tentang kekerasan simbolik. Guru-guru di SMAN 8 Saumlaki tidak menyadari bahwa kekerasan simbolik dalam bentuk dan mekanisme eufemisme dan sensorisasi yang mereka lakukan dalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum. Bagi guru yang mereka lakukan dan tampilkan di hadapan peserta didik merupakan upaya mengontrol atau mengawasi perilaku peserta didik demi menertibkan dan mendisiplinkan peserta didik bukan dalam rangka melakukan kekerasan simbolik. Hal ini tampak dalam beberapa data wawancara, misalnya “Karena peraturan berfungsi sebagai pengatur semua kegiatan di sekolah sehingga segala kegiatan di sekolah dapat berjalan tertib dan lancar.

Peserta didik adalah seorang pelajar yang wajib mematuhi segala peraturan yang diterapkan guru di sekolah”, “Karena dengan disiplin peserta didik tidak mengganggu jam belajar di kelas”, “Karena sekolah merupakan Lembaga formal yang mempertemukan peserta didik dari semua kalangan dan diharapkan tidak terjadi perbedaan yang mencolok satu dengan yang lain (harus sama) dalam berpakaian”, “Karena semua proses yang terjadi di sekolah diatur dengan waktu”, “Karena dengan kedisiplinan maka peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar dan dapat tercipta situasi pembelajaran yang menyenangkan”, “Karena peraturan dapat mengajarkan peserta didik tentang kedisiplinan”, “Saya wajib mengikuti peraturan sekolah karena memang saya seorang pelajar dan mengenyam pendidikan di sekolah. Jika saya ingin dibina menjadi peserta didik yang disiplin maka saya harus mengikuti aturan yang mengikat saya di sekolah”. Dari pelbagai alasan tersebut dapat dikemukakan bahwa peserta didik memandang peraturan dan tata tertib sekolah maupun kelas sebagai alat pengontrol perilaku mereka dan bahkan menjadi budaya, kebiasaan atau gaya hidup yang diistilahkan Bourdieu sebagai habitus tanpa disadari dipaksakan oleh guru kepada peserta didik. Kondisi ini menunjukkan adanya kekerasan simbolik pada peserta didik (Martono, 2019).

Kedua, adanya pola relasi yang tidak setara antara guru sebagai pihak yang dominan dan peserta didik sebagai pihak yang terdominasi. Praktik eufemisme dan sensorisasi oleh guru dipandang lumrah oleh peserta didik. Peserta didik menganggap bahwa tindakan guru bukanlah kekerasan melainkan kewajaran dalam mendisiplinkan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang kondusif (Damayanti, Andarwulan, & Aswadi, 2019). Demi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif maka guru menegakan moral kehormatan secara terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Namun Guru mengakui bahwa ancaman dan paksaan, serta pemarginalan tidak dengan maksud merendahkan peserta didik melainkan sebagai wujud tindakan tegas guru kepada peserta didik. Guru juga tidak bermaksud menampilkan diri sebagai seorang pribadi yang otoriter dan yang memiliki kuasa melainkan guru memposisikan diri sebagai sosok yang menjaga kredibilitas dan konsisten. Guru berkeyakinan bahwa jika peserta didik menghidupi moral kehormatan maka lingkungan sekolah dan lingkungan kelas menjadi kondusif.

Dalam hal ini guru bertindak sebagai motivator bagi peserta didik untuk menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik. Hal ini senada dengan pendapat Djamarah bahwa sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi edukatif (2010: 45). Sebaliknya peserta didik meyakini sebagai kebenaran. Peserta didik juga memandang tindakan pendisiplinan guru sebagai suatu kewajaran karena guru yang bertugas sebagai orang tua kedua

---

bagi seluruh peserta didiknya. perintah dan larangan, peraturan dan tata tertib, pemberian bonus, kepercayaan, sopan santun, hukuman atau sanksi ancaman dan paksaan, pemarginalan merupakan cara wajar yang harus diterapkan guru kepada peserta didik.

Hasil temuan ketiga, strategi mencegah kekerasan simbolik dalam relasi guru dan peserta didik di SMAN 8 Saumlaki. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang sudah tertanam dalam kebiasaan dan sudah menjadi habitus. Kekerasan simbolik yang terjadi dalam relasi dan interaksi guru dan peserta didik sering sulit dikenal dan diidentifikasi namun bukan berarti tidak dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berhadapan dengan fakta adanya kekerasan simbolik di SMAN 8 maka penulis hendak menyajikan beberapa strategi untuk mencegah kekerasan simbolik dalam relasi guru dan peserta didik di SMAN 8 Saumlaki, sebagai berikut:

Pertama, Sosialisasi penyadaran tentang bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik yang terjadi disebabkan oleh karena pemahaman yang minim dari guru maupun peserta didik tentang bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik. Maka sekolah dalam hal ini para guru perlu menyadari dan memahami tentang kekerasan simbolik. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada para guru dan peserta didik. Melalui sosialisasi maka para guru dan peserta didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai sehingga dapat memutus rantai adanya bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik di sekolah

Kedua, Menguk secara objektif adanya kekerasan simbolik guru kepada peserta didik. Setelah guru dan peserta didik memahami dan menyadari tentang bentuk dan mekanisme kekerasan simbolik maka sekolah dalam hal ini para guru perlu mengakui bahwa pembiasaan, pengawasan, tutur kata, dan perilaku yang ditampilkan guru terhadap peserta didik mengandung bentuk dan mekanisme kekerasan.

Ketiga, Keyakinan kelas. Sekolah perlu menciptakan kondisi agar peserta didik dapat menentukan sendiri perilaku yang diterima oleh semua orang. Perilaku diyakini memiliki nilai positif yang dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, saling menghargai dan menyenangkan dalam interaksi dengan guru dan sesama peserta didik.

Keempat, Menjadikan peraturan sebagai kesepakatan. Dalam hal ini guru melibatkan peserta didik dalam menciptakan kesepakatan Setiap pendapat dihargai dan akomodasi sebagai kesepakatan. Perilaku-perilaku yang ditampilkan dirangkul menjadi nilai-nilai yang disepakati bersama. Kedisiplinan harus datang dari peserta didik berdasarkan keyakinan dan kemauan bukan karena rasa takut atau karena ingin dihargai. Dengan demikian peserta didik merasa senang menjalankan kesepakatan yang menjadi panduan yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam mengontrol diri sendiri. Kelima, Kekerasan simbolik yang terjadi di sekolah dapat dilawan dengan sikap guru yang dialogis.

## **Simpulan**

Kekuasaan simbolik sering terjadi dalam bentuk dan mekanisme eufemisme dan sensorisasi yang sifatnya halus sehingga tidak mudah teridentifikasi. Hal inilah yang menyebabkan kaum terdominasi seringkali merasa tidak keberatan untuk berada dalam arena dominasi. Bentuk dan mekanisme eufemisme yang tampak dominan di SMAN 8 Saumlaki dalam wujud perintah dan larangan; peraturan dan tata tertib; pemberian bonus; kepercayaan; hukuman atau sanksi. Sedangkan bentuk dan mekanisme sensorisasi yang dominan terjadi di SMAN 8 Saumlaki terwujud dalam ancaman dan paksaan serta pemarginalan yang mengakibatkan peserta didik merasa malu, kaget, takut, tertekan, terpaksa dan tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresi diri secara otentik, namun menerima sebagai suatu kewajiban.

Penyebabnya yakni terletak pada pemahaman yang minim dari para guru terkait kekerasan simbolik serta adanya pola relasi yang tidak seimbang. Solusi strategis yang ditawarkan adalah perlu adanya pengkondisian iklim sekolah yang bebas dari kekerasan simbolik. Beberapa saran yang hendak diutarakan dari tulisan ini yakni: Pertama, bagi Sekolah. Perlu adanya Kebijakan sekolah yang menekankan budaya sekolah yang lebih dialogis tanpa ada unsur kekerasan simbolik. Kedua, bagi Guru. Guru hendaknya mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang tentang kekerasan simbolik serta pengakuan yang objektif terhadap adanya habitus kekerasan simbolik di sekolah. Ketiga, bagi peserta didik. Peserta didik sebaiknya bersikap kritis terhadap perilaku guru yang mengandung kekerasan simbolik dan berani menyampaikan kepada guru. Keempat, bagi para peneliti. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya baik secara metodologi maupun fokus kajian.

## Referensi

- Agustina, D. (2022). Makna Kekerasan dalam Perspektif Guru dan Siswa. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 4(3), 122-130.
- Amirulloh, S. (2018). Kekerasan Simbolik dalam Mewujudkan Ekosistem Pendidikan Kondusif di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu (Doctoral dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Bilqis, F., Karina, T., & Latipah, I. C. (2019). Peran konselor dalam mewujudkan sekolah aman dan damai bagi siswa. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(3), 115-122.
- Bourdieu, Pierre. (2006). *The Logic of Practice*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2018). Structures, habitus, practices. In *Rethinking the Subject* (pp. 31-45). Routledge.
- Damayanti, G., Andarwulan, T., & Aswadi, A. (2019). Mekanisme Eufemisme Dan Sensorisasi: Kekerasan Simbolik Dalam Tuturan Dosen. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 12(2), 223-234.
- Fashri, Fauzi. (2014) *Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Haryatmoko. (2017) *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasbullah, (2009). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jazeri, M. (2009). Pertarungan simbolik dalam wacana bantuan khusus mahasiswa. *Litera*, 8(1).
- John B Thompson dan Haqqul Yaqin (2003) *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia* (2003),
- Martono, N. (2012) *Kekerasan Simbolik Di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Martono, N. (2019). Sekolah inklusi sebagai arena kekerasan simbolik. *Sosiohumaniora*, 21(2), 150-158.
- Kirk dan Miller dalam Moleong, J Lexy. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ritzer. (2005) *George dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Modern diterjemahkan oleh Alimandan*. Jakarta: Kencana.

- Roosyidah, H., & Sutarna, N. (2016, August). Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Pembentukan Akhlak Siswa. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Nashihin, H. (2019). Konstruksi Budaya Sekolah Sebagai Wadah Internalisasi Nilai Karakter. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 8(1), 131-149.
- Sarwono, Jonathan. (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidjabat, B. S. (2021). *Membesarkan anak dengan Kreatif: Panduan Menanamkan Iman dan moral kepada anak sejak Dini*. Pbmri Andi.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful Bahri Djamarah. (2010). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- W. Gulo. (2003). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo
- William E Deal dan Timothy Kandler Beal. (2004). *Theory for Religious Studies*, New York : Routledge.